

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanaahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“OPTIMALISASI KETERLIBATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah)”** sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, nasehat, kritikan dan bantuan, baik yang bersifat moril maupun materiil, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, kepada :

1. Bapak Dr. Anis Malik Toha selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto,SH., SE, Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Ketua Tim Penguji Tesis Penulis .
3. Ibu Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H dan Bapak Dr. H. Djauhari, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dan Penguji yang telah sabar dan penuh kesanggupan memberikan bimbingan, saran dan dorongan sehingga penyusunan Tesis ini dapat selesai.
5. Bapak dan Ibu Staff Pengajar dan Administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Bambang Sumardiono, Bc.IP., S.H., M.Si selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah atas izin yang diberikan kepada Penulis untuk melakukan penelitian
7. Bapak Heriyanto, S.H., M.H selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada saat Penulis melakukan Penelitian, Ibu Dra. Sunarsih, S.E., S.H., M.M selaku Kepala Bidang Hukum, Bapak Tri Junianto, S.H., M.H selaku Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Komoditas Hukum Daerah, Heny Andriana, S.H., M.H selaku Perancang Peraturan

Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah atas ketersediannya memberikan informasi data yang penulis butuhkan untuk terselesaikannya tesis ini.

8. Rekan-Rekan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Rekan-Rekan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 26 Tahun 2015.
9. Bapak Sugiyatno dan Ibu Umiyati kedua orang tua tercinta dengan do'a, restu, semangat dan dukungannya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
10. Fita Ika Agustina, Beni Kurniawan, Putri Utami Yuniati, Arif Waskito Wicaksono, Kakak dan Adik Penulis yang tercinta, terima kasih atas do'a dan dukungannya.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu serta pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar bermandaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun adar tesis ini lebih sempurna serat sebagai masukan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu ketatanegaraan pada khususnya.

Semarang, April 2017

Sinta Dewi Wijayanti,
MH.15.26.1819

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat	8
E. Kerangka Konseptual	10
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peraturan Perundang-undangan	28
1. Pembentukan Perundang-undangan menurut Hukum Islam.....	28
2. Dasar Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan.....	31

3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	39
4. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan.....	47
B. Kajian tentang Otonomi Daerah	58
C. Kajian tentang Peraturan Daerah	66
1. Kedudukan Peraturan Daerah.....	66
2. Fungsi Peraturan Daerah.....	67
3. Materi Muatan Peraturan Daerah.....	68
4. Hak Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah.....	69
5. Landasan Formil dan Landasan Materiil Pembentukan Peraturan Daerah.....	71
6. Pengawasan terhadap Perda.....	73
7. Keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	74

BAB III HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN

A. Keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	79
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Wilayah.....	79
2. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah.....	87
a. Perencanaan	77
b. Penyusunan.....	83
c. Pembahasan.....	91
d. Penetapan.....	94
e. Pengundangan.....	110

3. Keterlibatan Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	121
a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.....	121
b. Berdasarkan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	149
B. Optimalisasi Keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa tengah dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	180
1. Program Aksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM....	180
a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014.....	181
b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	183
c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Manusia Nomor M.HH-06.KP.05.03 TAHUN 2016 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016.....	185
2. Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	187

C. Akibat Hukum Optimalisasi Keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Peraturan Daerah	193
---	-----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	204
B. Saran	206

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku	208
B. Peraturan Perundang Undangan	211
C. Artikel/Jurnal Ilmiah	212
D. Internet	212